

LAPORAN EVALUASI PEMILU TAHUN 2024



**KPU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmad dan hidayah-Nya Kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terlaksana sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan. Terlaksananya Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari masyarakat, Partai Politik peserta Pemilu itu sendiri, Pengawasan yang preventif bersama-sama mensukseskan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan berkualitas. Ini terbukti dengan diterimanya semua hasil Pemilu Tahun 2024 oleh Peserta Pemilu.

Adapun maksud dan tujuan penyampaian laporan ini adalah merupakan wujud dan tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu pada Bangsa dan Negara Republik Indonesia terlebih pada Rakyat Indonesia yang telah diberi tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Untuk lebih menyempurnakan laporan ini KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tangan terbuka mengaharapkan kritikan dan masukan agar laporan ini dapat menjadi bahan dalam mengembangkan potensi diri sebagai penyelenggara Pemilu. Tak lupa juga KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan terimakasih kepada yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung kiranya diberi berkat dan rahmat-NYA kepada kita semua.

Akhir kata atas perhatian dan kerjasama yang baik, yang telah dibangun selama ini semoga menjadi kekuatan kita untuk lebih baik pada Pemilu yang akan datang. Kami berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kedepannya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan berkahn-Nya dari Allah SWT.

Selatpanjang, 30 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti

Ketua,



SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengacu pada Undang-undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 tahun 2017. Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

Laporan Evaluasi Pemilu Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Selatpanjang, 29 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti



DAFTAR ISI

Pengantar	1
Sambutan	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.A Latar Belakang	4
1.B Dasar Hukum	6
1.C Tujuan.....	6
1.D Manfaat.....	8
BAB II DESAIN EVALUASI	10
2.A Kriteria Evaluasi	10
2.A Prinsip Evaluasi.....	12
2.A Metode Evaluasi.....	14
BAB III LANDASAN TEORI.....	16
3.A Teori Integritas Pemilu	16
3.B Teori Manajemen Pemilu	19
3.C Teori Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu.....	20
BAB IV HASIL EVALUASI.....	22
4.A Deskripsi Statistik	22
4.A.1 Potret Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	23
4.A.2 Potret Penyelenggaraan Non-Tahapan Pemilu.....	44
4.A.3 Potret Kelembagaan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.A Kesimpulan	105
5.B Saran	105
BAB VI PENUTUP	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Salah satu tugas dan kewajiban KPU yang diamanatkan di dalam undang-undang pemilu adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Evaluasi secara umum diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji sebuah program atau kegiatan yang dimaksudkan menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta menilai capaian dari program tersebut. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu tersebut. Evaluasi ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan

tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Adapun ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

Penyelenggaraan evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu yang tersedia. Di samping itu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, juga sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak.

Berbagai tantangan tersebut di atas mendorong KPU untuk memilih dan menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan evaluasi yang diharapkan tidak akan terlalu membebani pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak, namun masih dapat menghasilkan capaian hasil evaluasi yang akurat dan akuntabel. Oleh karenanya, evaluasi ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survey, dimana kuesioner survey diisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Data yang diperoleh dari survey ini akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan potret penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya.

Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

B. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- 3) Keputusan Ketua KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

C. Tujuan

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.
2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.
3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.

4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.
7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pemilu Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU ini secara khusus memiliki tujuan untuk:

1. **Menilai penyelenggaraan pemilu tahun 2024:** baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.
2. **Membangun model dan standar evaluasi pemilu:** yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang.

D. Manfaat

Evaluasi Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU ini bermanfaat untuk menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah :

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan pelanggan (Halimah, 2020).
2. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.

3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga.
4. Evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi pemilu serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh KPU.
6. Hasil evaluasi pemilu serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi trigger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen pemilu, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu adhoc, penggunaan sistem IT dalam pemilu, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi pemilu serentak.

BAB II

DESAIN EVALUASI PEMILU 2024

2.A Kriteria Evaluasi

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

- 1) Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
- 2) Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
- 3) Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
- 4) Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan

nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

- 1) Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
- 2) Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
- 3) Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;

- 4) Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
- 5) Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
- 6) Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi pemilu ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriteria berikut:

- a. Kesesuaian penyelenggaraan pemilu dengan tujuan pemilu.
- b. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
- c. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

2.B Prinsip Evaluasi

Evaluasi pemilu Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti

administratif (*Self assessment combined with evidence based evaluation*).

- 2) Prinsip *Comprehensiveness* yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
- 3) Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.
- 4) Tipe Evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri sebagai tujuan kebijakan. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan berdasarkan tingkat tercapainya tujuan program atau kebijakan.
- 5) Evaluasi proses (*proses of public policy implementation*) adalah penelitian evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan kebijakan berdasarkan pada kesesuaian proses pelaksanaan dengan petunjuk yang tersedia.

Tipe evaluasi yang dipergunakan di dalam evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini adalah gabungan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil.

2.C Metode Evaluasi

Evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 dibuat berdasarkan sebuah konstruksi alur berpikir evaluasi. Penyusunan konstruksi alur berpikir (*logical framework*) dalam pelaksanaan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur, logis dan sistematis.

Adapun logika berpikir dalam penyelenggaraan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini dapat digambarkan sebagai berikut :

RUJUKAN	UU Pemilu dan PKPU	Renstra KPU	PKPU Ortaker
LANDASAN TEORI	Grand Theory: Teori <i>Electoral Integrity</i> Middle Theory: Teori <i>Election Management Body</i> Applied Theory: Teori Manajemen Pemilu		
DIMENSI EVALUASI	Tahapan dan Non-Tahapan Pemilu	Supporting Systems (kelembagaan KPU)	Eksternalitas
INDIKATOR			

Gambar 1. Logical Framework Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024

Rujukan yang dimaksud dalam penyelenggaraan evaluasi pemilu serentak tahun 2024 ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang dipedomani dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, baik dalam konteks penyelenggaraan tahapan dan non- tahapan pemilu, maupun dalam konteks penyediaan dukungan teknis penyelenggaraan pemilu oleh sekretariat KPU. Oleh karenanya, salah satu acuan penilaian yang dipergunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah UU Pemilu, Peraturan KPU, Keputusan KPU, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Landasan teori dipergunakan untuk menjadi dasar pijakan dalam mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Kedudukan landasan teori ini sangat penting untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientific judgement*) dan menghindari penilaian secara subyektif. Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas tiga tingkatan teori, yakni *grand theory* (teori dasar sekaligus utama) berupa teori integritas pemilu; *middle theory* yakni teori kelembagaan organisasi penyelenggara pemilu (*theory of Electoral Management Body/EMB*); dan ketiga *applied theory* yakni teori manajemen pemilu (*theory of Electoral Management*). Penjelasan secara lebih mendalam tentang landasan teori ini dijabarkan di dalam Bab III.

Ruang lingkup sasaran evaluasi Pemilu serentak tahun 2024 ini mencakup tiga dimensi:

1. Dimensi Tahapan & Non-Tahapan Pemilu yang mencakup evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil pemilu, serta non-tahapan pemilu yang mencakup pengadaan logistik pemilu dan pelaporan dana kampanye pemilu.
2. Dimensi Kelembagaan yang mencakup penyediaan fasilitasi dukungan mulai dari administrasi, anggaran, SDM, maupun sarana.
3. Dimensi Eksternalitas yang mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain- lain yang terjadi di luar KPU namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024.

Dari ketiga dimensi evaluasi tersebut, diturunkan ke dalam 350 indikator penilaian yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kuesioner evaluasi. Adapun konstruk dimensi, indicator dan sub-indikator yang dipergunakan dalam evaluasi pemilu di tingkat satker KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah :

BAB III

LANDASAN TEORITIS

3.A Teori Integritas Pemilu

Pemilu merupakan rangkaian perwujudan prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia dalam politik. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penyelenggaraan pemilu untuk dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan berpegang teguh pada suatu nilai moral dan etika, yang dikenal dengan integritas. Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi wujud dari kualitas demokrasi. Apabila suatu desain kriteria penyelenggaraan pemilu tidak terlaksana, maka menurut Przeworski akan menghasilkan “demokrasi minimalis”. Demokrasi minimalis berarti terpenuhinya prosedur politik demokratis namun kualitas demokrasinya tidak dipersoalkan (Silalahi, 2022).

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dilakukan dengan berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilatut dengan integritas yang tinggi untuk mengakomodir hak politik warga negara. Hal tersebut menjadi suatu esensi penting untuk mewujudkan pemilu demokratis, yang dihasilkan dari profesionalitas penyelenggara pemilu yang berintegritas, kredibel, dan akuntabel.

Integritas merujuk pada kepatuhan terhadap pedoman nilai dan etika. Integritas menjadi penentu seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan moralnya yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga secara normatif, integritas menjadi persoalan sosiologis yang dibebankan kepada seseorang atau lembaga (Iqbal, 2020; Silalahi, 2022). Dalam konteks pemilu, integritas pemilu diartikan sebagai tindakan dan kapabilitas penyelenggara pemilu dalam keinginannya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dengan berpedoman pada moral dan etika. Pemilu tanpa adanya integritas dapat memicu kekosongan dalam proses demokrasi yang berujung pada delegitimasi pemerintahan yang berakhir pada ketidakstabilan politik.

Terdapat suatu konsep dalam integritas pemilu yang dibedakan menjadi *concept-based approach* dan *process-based approach* yang dikembangkan oleh Carolien Van Ham. Ham mengkategorisasi beberapa konsep yang pernah dikeluarkan oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang integritas pemilu. *Concept-based approach* mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi, sedangkan *process-based approach* mempertimbangkan proses penyelenggaraan pemilu. Konsep yang digunakan oleh Muzaffar dan Schedler dengan istilah *electoral governance* menggambarkan konsep *process-based approach* dengan menjadikan tata kelola pemilu sebagai esensi utama dalam integritas pemilu melalui rangkaian kegiatan pemilu, mulai dari proses pra-pemilu, saat pemilu, hingga setelah pemilu.

Beberapa peneliti juga menggabungkan *concept-based approach* dan *process-based approach* untuk mendefinisikan integritas pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Elklit dan Svansson melalui definisi “*free and fair*” yang didasarkan pada teori demokrasi yang kemudian disempurnakan melalui penerapannya dalam tahapan pemilu (Ham, 2015). *Concept-based approach* memberikan keuntungan untuk menjadi tolak ukur evaluasi pemilu, yang didukung oleh pertimbangan pada setiap tahapan pemilu (*process-based approach*) untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas.

Literatur mengenai integritas pemilu telah berkembang dalam mengidentifikasi sejumlah faktor penentu integritas pemilu, mulai dari faktor struktural seperti pengalaman historis dengan pemilu demokratis dan ciri-ciri sosio-ekonomi masyarakat, hingga penjelasan institusional yang terfokus pada sistem pemilu dan keberadaan pengawasan dan keseimbangan kelembagaan, hingga penjelasan yang lebih dekat yang terfokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam manipulasi pemilu dan pengawasan pemilu (James, et al. 2019).

Penjelasan struktural merujuk pada struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang memengaruhi hubungan kekuasaan antara warga negara dan elit, seperti ketimpangan ekonomi dan keragaman

sosial. Peneliti menemukan bahwa manipulasi pemilu lebih sering terjadi di negara-negara dengan tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Penjelasan institusional menitikberatkan pada peran lembaga-lembaga politik yang menentukan aturan dalam proses pemilu. Lembaga-lembaga yang meningkatkan persaingan, seperti sistem pemilu mayoritas, cenderung memperbesar peluang terjadinya manipulasi pemilu, sedangkan sistem pemilu proporsional terbukti dapat mengurangi tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi dalam sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen.

Penjelasan berbasis aktor berfokus pada keputusan strategis yang diambil oleh aktor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik pemilu tertentu. Temuan mengenai dampak kompetisi pemilu masih bervariasi, namun integritas pemilu cenderung paling tinggi pada pemilu yang memiliki tingkat persaingan yang cukup. Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap integritas pemilu, sementara dampak pengawasan dari pemantau pemilu internasional dan domestik menunjukkan hasil yang beragam.

Integritas pemilu menjadi aspek penting untuk membangun kualitas demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan pemilu, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik dalam pemilu. Integritas pemilu kerap dijadikan bahan perhitungan. Dalam pemilu yang secara prosedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan dihitung dan para kandidat dan partai bersaing di lapangan yang setara. Namun, ketika diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” pemilu (Norris, 2014). Malpraktik dalam pemilu yang terjadi secara terus menerus, ditambah dengan ketidakpuasan

dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi dalam sistem pemilu.

Beberapa peneliti meletakkan fokusnya tentang integritas pemilu dalam konteks negatif (Ham, 2015). Lehoucq menaruh fokusnya dalam kegagalan pemilu yang berintegritas yang disebabkan oleh pelanggaran (election fraud) dan manipulasi suara (ballot-rigging). Hal tersebut akan berdampak pada sentimen publik pada pemilu, yang dapat mengikis atau mendikreditkan pemilu itu sendiri (Silalahi 2022; Lehoucq, 2003). Konsep lainnya seperti malpraktik pemilu (election malpractice), yang utamanya dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (inequality), rendahnya tingkat urbanisasi, dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes (Silalahi, 2022; Darnolf, 2012).

Toby S. James membuka perspektif baru untuk mengenal lebih dalam tentang apa yang dapat memengaruhi suatu integritas pemilu. James membuka perspektifnya melalui pengaruh desain organisasi lembaga penyelenggara pemilu terkait sentralisasi; independensi; kapasitas; ruang lingkup; relasi eksternal; teknologi; dan personel, untuk membuktikan pengaruhnya terhadap performa lembaga penyelenggara pemilu. Poin-poin tersebut menjadi esensi bagi luaran kinerja lembaga penyelenggara pemilu berupa integritas pemilu dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu (James, et al. 2019).

3.B Teori Manajemen Pemilu

Korelasi Kapasitas EMB dengan penurunan politik uang.

Lundstedt dan Edgell dalam risetnya menunjukkan bahwa kapasitas lembaga penyelenggara pemilu yang baik dapat menghalangi praktik jual beli suara melalui dua mekanisme kausal utama :

- 1) Dengan meningkatkan risiko deteksi dan hukuman, kapasitas lembaga penyelenggara pemilu meningkatkan biaya pembelian suara bagi partai dan kandidat.

- 2) Dengan meningkatkan kepercayaan pada pemilu, kapasitas lembaga penyelenggara pemilu meningkatkan nilai ekspresif pemungutan suara.

Hal ini menurunkan insentif bagi pemilih untuk terlibat dalam praktik jual beli suara dan meningkatkan kemungkinan mereka akan mengingkari perjanjian jual beli suara.

3.C Teori Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum dalam diskursus internasional sering disebut dengan Election Management Body (EMB). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengorganisir penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan umum, sesuai dengan jenis pemilihan umum yang diberlakukan di masing-masing negara.

Meskipun memiliki sejumlah fungsi umum, EMB secara global memiliki perbedaan dalam strukturnya. Wall et al. (2006) mengidentifikasi tiga model utama lembaga pemilihan umum: EMB independen, EMB pemerintah, dan EMB 'campuran'. EMB independen bersifat independen dari cabang eksekutif (pemerintah) dan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilu dan sangat sering juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu. Mereka terdiri dari para ahli yang tidak berpihak atau perwakilan dari partai politik (atau campuran keduanya) dan paling sering bertanggung jawab kepada legislatif.

EMB pemerintah, di sisi lain, dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri yang bertanggung jawab kepada menteri kabinet. Artinya, dalam model ini, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, baik melalui kementerian (misalnya Kementerian Dalam Negeri) dan/atau melalui pemerintah daerah. Model ini dalam prakteknya juga memiliki banyak sub-model sebagaimana diterapkan oleh banyak negara. Swedia

dan Swiss, misalnya, lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat hanya menjalankan beberapa fungsi utama, dan menyerahkan tugas-tugas (terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari pemilihan) kepada badan-badan lokal dan/atau regional. Di Inggris dan AS, sistemnya sangat terdesentralisasi sehingga tidak ada lembaga penyelenggara pemilu pusat, dan semua urusan diserahkan kepada otoritas lokal. Yang terpenting, dan terlepas dari seberapa terdesentralisasi mereka, lembaga penyelenggara pemilu dalam model ini hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemilu saja, mereka tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan sebagaimana yang dimiliki lembaga penyelenggara pemilu independen.

Model 'campuran' menggabungkan unsur-unsur dari model independen dan model pemerintahan. Pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan melalui kementerian dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana model pemerintahan, namun ada badan kedua, yang independen dari eksekutif, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi pemilu. Dalam beberapa kasus, badan yang bersifat independen ini memiliki kewenangan untuk mengembangkan kerangka regulasi pemilu berdasarkan undang-undang.

Masing-masing model lembaga penyelenggara pemilu ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Wall et al. (2006: 21) menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu yang independen diuntungkan karena kecil kemungkinannya untuk tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau tekanan politik. Otonomi ini, bersama dengan persepsinya tentang ketidakberpihakan akan dapat meningkatkan legitimasi pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan model lembaga penyelenggara pemilu yang independen ini banyak diterapkan di kalangan negara-negara demokrasi baru.

Keuntungan lain dari lembaga penyelenggara pemilu yang independen adalah bahwa mereka mungkin lebih mampu mengembangkan profesionalisme staf, memastikan administrasi pemilu berada di bawah

kendali terpadu dan merencanakan serta melembagakan tugas-tugas pemilu.

Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu yang independen memiliki kelemahan. López-Pintor (2000) menjelaskan kelemahan ini antara lain: lembaga penyelenggara pemilu yang independen kurang memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga dapat menghambat mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Lemahnya pengaruh politik ini juga dapat berdampak kepada sulitnya memperoleh dukungan pendanaan yang cukup. Lebih jauh lagi, lembaga penyelenggara pemilu independen ini juga cenderung bekerja dengan biaya yang lebih tinggi karena, tidak seperti lembaga penyelenggara pemilu pemerintah, mereka tidak dapat memanfaatkan staf yang terampil dan menggandeng struktur pemerintah untuk membantu pelaksanaan pemilu.

Namun demikian, Wall et al. (2006: 11) mengingatkan bahwa kualitas kinerja, efisiensi, keterbukaan, transparansi, profesionalisme dan imparsialitas penyelenggara pemilu tidak hanya ditentukan oleh struktur lembaga penyelenggara pemilu. Perilaku lembaga penyelenggara pemilu juga memegang peran yang sangat penting. Wall mengatakan bahwa meskipun independensi lembaga penyelenggara pemilu diatur secara hukum dalam konstitusi atau undang-undang pemilu (seperti di Meksiko dan Uruguay), tidak berarti bahwa ketidakberpihakan dan otonomi dari kendali pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam model lainnya. Lembaga penyelenggara pemilu pemerintah (seperti di Selandia Baru dan Swedia) dianggap adil dan tidak memihak meskipun merupakan lembaga pemerintah. Kinerja lembaga penyelenggara pemilu juga bergantung pada kemauan politik dan komitmen untuk membiarkan lembaga penyelenggara pemilu bertindak bebas dan tidak memihak, serta pada bagaimana pimpinan lembaga penyelenggara pemilu berperilaku dengan benar dan berintegritas.

BAB IV

HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilu serentak tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab IV ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

IV.A Deskripsi Statistik

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertanyaan mencakup indikator tahapan pemilu dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan pemilu.

VI.A.1 TAHAPAN

1) Tahapan Pendaftaran Pemilih

Evaluasi terhadap dimensi tahapan pemilu pada indikator tahapan pendaftaran pemilih melibatkan sub-indikator yang terdiri atas: a) Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih; b) jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai; c) Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS; d) Kendala dalam rekrutmen Pantarlih; e) Persentase kesesuaian data bahan cokolit dengan hasil cokolit yang dilaksanakan Pantarlih; f) Ketercukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih; g) Kepatuhan Pantarlih terhadap ketentuan perundang-undangan; h) Persentase penggunaan e-cokolit oleh

Pantarlih; i) Ketepatan waktu penetapan DPS dan DPT; j) Akses masyarakat terhadap cekdptonline; k) Masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT; l) Tindakan lanjut KPU atas masukan masyarakat; m) Kepatuhan hukum (kejadian pelanggaran pemilu) dalam pendaftaran pemilih; n) Tindak lanjut putusan Bawaslu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat digambarkan data sebagai berikut :

a) Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	Apakah Pantarlih dibentuk tepat waktu?	KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pembentukan Pantarlih sebanyak 667 dibentuk tepat waktu sesuai dengan Tahapan Pembentukan Pantarlih.	SK Pantarlih

b) jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai.

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai?	Ya Memadai	

c) Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pembentukan Pantarlih sebanyak 677 dibentuk tepat waktu sesuai dengan Tahapan Pembentukan Pantarlih.	SK Pantarlih

d) *Kendala dalam rekrutmen Pantarlih*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk	Apa kendala dalam rekrutmen Pantarlih?	Tidak Ada Kendala	SK Pantarlih

e) *PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaann ya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh?	Ya Dapat dilaksanakan secara utuh	

f) *SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaann ya di seluruh tingkatan	Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan	Ya Mudah dipahami	

			penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?		
--	--	--	--	---	--	--

g) *Kesesuaian Data Bahan Coklit Dengan Hasil Coklit Yang Dilaksanakan Pantarlih*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Berapa persen kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?	Dalam hal kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menyimpulkan bahwa kesesuaian antara data bahan coklit dan hasil coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih rentang persentase kesesuaian berada dalam rentang 98% - 100% dan ini menunjukkan bahwa data bahan coklit sangat sesuai dengan hasil coklit yang dilakukan.	

h) *Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
-----	---------	---------------	-----------	------------	---------	-------------

8	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc	Apakah Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?	Ya Pantarlih di wilayah kerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah bekerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ini	
					dapat dilihat dari 677 Pantarlih yang dibentuk tidak ada laporan baik dari masyarakat ataupun PKD yang melaporkan bahwa Pantarlih tidak melakukan cokolit ke rumah Warga	

i) *Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan cokolit	Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?	Pantarlih di wilayah kerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 677 Pantarlih menggunakan ecoklit 100%.	Dokumen laporan hasil cokolit oleh pantarlih

j) *Jadwal Penetapan DPS*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Penyusunan dan Penetapan DPS	Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?	Ya Sesuai dengan jadwal	BA dan SK Penetapan DPS

k) *Jumlah masyarakat yang mengakses link cekdptonline*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
-----	---------	---------------	-----------	------------	---------	-------------

11	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Masukan Masyarakat	Berapa jumlah masyarakat yang mengakses link cekdptonline?	Untuk link cekdptonline KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat mengetahuinya karena dalam fitur tersebut tidak ada rekapan atau jumlah masyarakat yang mengakses	Data dari situs cekdptonline masing-masing daerah
----	---------	---------------------	--------------------	--	---	---

l) Jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Masukan Masyarakat	Berapa jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT?	0	-

m) Jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Masukan Masyarakat	Berapa jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya?	0	

n) Jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
14	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Penyusunan dan Penetapan DPT	Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	

o) DPT ditetapkan sesuai jadwal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
15	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Penyusunan dan Penetapan DPT	Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?	Ya DPT ditetapkan sesuai jadwal	BA dan SK DPT

p) DPT ditetapkan sesuai jadwal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
15	Tahapan	Pendaftaran Pemilih	Permasalahan Hukum	Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih?	Tidak ada pelanggaran	

2) Pendaftaran Peserta Pemilu

a) DPT ditetapkan sesuai jadwal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh?	Ya dapat dilaksanakan secara utuh	

b) Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Verifikasi Calon Peserta Pemilu	Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual?	Ya dilakukan verifikasi Faktual	Dokumentasi Verifikasi Faktual

c) Melakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
-----	---------	---------------	-----------	------------	---------	-------------

3	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Verifikasi Calon Peserta Pemilu	Apakah dilakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual?	Ya dilakukan Koordinasi	Dokumentasi Verifikasi Faktual
---	---------	----------------------------	---------------------------------	---	-------------------------	--------------------------------

d) *Melakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Layanan Helpdesk	Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Helpdesk	SK, photo kegiatan, Laporan kegiatan helpdesk

e) *Jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Layanan Helpdesk	Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk?	10-20 Layanan	Dokumentasi

f) *Verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
-----	---------	---------------	-----------	------------	---------	-------------

6	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Pemutahiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik	Apakah dilakukan verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotaan dan Pengurus Partai Politik?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pemutakhiran Keanggotaan dan Pengurus Parpol	SK Parpol
---	---------	----------------------------	---	--	--	-----------

g) *Penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Sipol	Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu	Ya Sangat membantu	

				dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?		
--	--	--	--	--	--	--

h) *Pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Tahapan	Pendaftaran Peserta Pemilu	Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?	Ada	Hasil Sidang Bawaslu Provinsi Riau

3) Daerah Pemilihan

a) *Pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Tahapan	Daerah Pemilihan	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi? Calon Peserta Pemilu?	Ya Sesuai dan dapat diimplementasikan dengan baik	

b) *Data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan akurat*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Tahapan	Daerah Pemilihan	Kualitas Data kependudukan dan wilayah	Apakah data kependudukan dan data wilayah	Ya Sesuai dan akurat	Laporan Dapil
				administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan akurat?		

c) *7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Tahapan	Daerah Pemilihan	Keterpenuhan Prinsip Penentuan Dapil	Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan?	Ya Dapat dilaksanakan	Laporan Dapil

d) *Pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
-----	---------	---------------	-----------	------------	---------	-------------

4	Tahapan	Daerah Pemilihan	Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil?	Tidak ada pelanggaran dan sengketa	Laporan Dapil
---	---------	------------------	--------------------	---	------------------------------------	---------------

4) Pencalonan

a) *Pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Tahapan	Pencalonan	Koordinasi	Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan koordinasi	

b) *Dinas Pendidikan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Tahapan	Pencalonan	Koordinasi	Dinas Pendidikan ?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan koordinasi	MOU

c) *Dinas Kesehatan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Tahapan	Pencalonan	Koordinasi	Dinas Kesehatan ?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan koordinasi	SD

d) *Kepolisian*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Tahapan	Pencalonan	Koordinasi	Kepolisian ?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	SD

					melakukan koordinasi	
--	--	--	--	--	----------------------	--

e) *Pengadilan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Tahapan	Pencalonan	Koordinasi	Pengadilan ?	Ya KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan koordinasi	SD

f) *Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Tahapan	Pencalonan	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?	Ya dapat diimplementasikan dengan baik	

g) *Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Tahapan	Pencalonan	Penetapan DCS	Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?	Ya DCS ditetapkan tepat waktu	SK DCS

h) *Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
-----	---------	---------------	-----------	------------	---------	-------------

8	Tahapan	Pencalonan	Masukan Masyarakat	Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota ?	Tidak Ada	Laporan Kegiatan
---	---------	------------	--------------------	--	-----------	------------------

i) Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Tahapan	Pencalonan	Penetapan DCT	Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?	Ya DCT ditetapkan tepat waktu	SK DCT

j) Setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Tahapan	Pencalonan	Penetapan DCT	Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota	Tidak	SK DCT
				DPRD Kabupaten/Kota , dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?		

k) *Pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Tahapan	Pencalonan	Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan?	Tidak	SK DCT

l) *Bakal calon menggunakan aplikasi SILON*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Tahapan	Pencalonan	Permasalahan Hukum	Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON ?	Ya	

m) *Kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SILON*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Tahapan	Pencalonan	Permasalahan Hukum	Apa saja kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SILON?	Tidak ada kendala	

5) Kampanye

a) *Bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Tahapan	Kampanye	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang	Ya perubahannya sudah ideal dengan kemampuan	

				diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran yang ada?	anggaran yang ada	
--	--	--	--	--	-------------------	--

b) Pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Tahapan	Kampanye	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?	Ya Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan	

c) Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Tahapan	Kampanye	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang	Ya Peserta pemilu di Kepulauan Meranti tanggung jawab Untuk	

				dipasang dengan baik?	pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik	
--	--	--	--	-----------------------	--	--

d) *Batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Tahapan	Kampanye	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?	Ya Batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan POLRI	

e) *Peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Tahapan	Kampanye	SIDEKA	Apakah peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?	Ya Peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) secara penuh	

f) *Persen peserta pemilu yang memanfaatkan aplikasi SIKADEKA*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Tahapan	Kampanye	SIDEKA	Berapa persen peserta pemilu yang memanfaatkan	100%	

				aplikasi SIKADEKA?		
--	--	--	--	-----------------------	--	--

g) Kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Tahapan	Kampanye	SIDEKA	Apa kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA?	Aplikasi beberapa kali mengalami maintenance	

h) Persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Tahapan	Kampanye	Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye	Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye?	70-90 %	Data SIKADEKA

i) Laporan dana kampanye diaudit oleh KAP

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Tahapan	Kampanye	Audit Dana Kampanye	Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP?	Ya	Laporan Audit KAP

j) Temuan dari hasil audit oleh KAP

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Tahapan	Kampanye	Audit Dana Kampanye	Apakah ada temuan dari hasil audit oleh KAP?	Tidak ada Temuan	Laporan Audit KAP

k) *Jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Tahapan	Kampanye	Audit Dana Kampanye	jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi	Tidak ada Temuan	Laporan Audit KAP

l) *Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Tahapan	Kampanye	Audit Dana Kampanye	Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang	Tidak ada Temuan	Laporan Audit KAP

m) *Jumlah sumbangan yang melebihi batas*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Tahapan	Kampanye	Audit Dana Kampanye	Jumlah sumbangan yang melebihi batas	Tidak ada Temuan	Laporan Audit KAP

n) *Kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
14	Tahapan	Kampanye	Audit Dana Kampanye	Apa kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP?	Proses konfirmasi dilakukan melalui Daring, sehingga kurang maksimal	Laporan Audit KAP

o) *Kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
15	Tahapan	Kampanye	Audit Dana Kampanye	Apa kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye?	Tidak ada Temuan	Laporan Audit KAP

p) Kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
16	Tahapan	Kampanye	Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye?	Tidak ada Sengketa terkait Kampanye	

6) Pemungutan dan Penghitungan Suara

a) KPPS memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah terdapat KPPS memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara?	Ya KPPS memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara	

b) Jumlah TPS di wilayah anda

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Berapa jumlah TPS di wilayah anda?	677	SK Penetapan TPS

c) TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan	Tidak ada	

				jadwal?		
--	--	--	--	---------	--	--

d) *TPS yang kekurangan surat suara*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara?	Tidak ada	

e) *Terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pelaksanaan Hak Pilih	Apakah terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS?	Tidak ada	

f) *Penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Ketepatan Waktu Penghitungan Suara	Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu?	Ya tepat waktu	

g) *Terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Permasalahan Hukum dalam Penghitungan Suara	Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS?	Ada, terdapat PSU Pasca MK	

h) Penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Penggunaan Sirekap oleh KPPS	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik?	Cukup baik, beberapa KPPS mengalami kendala jaringan	

i) PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Ketepatan Waktu Rekapitulasi Suara	Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?	Tidak ada	

j) KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Ketepatan Waktu Rekapitulasi Suara	Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?	Tidak ada	

k) KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Ketepatan Waktu Rekapitulasi Suara	Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?	Tidak ada	

l) *Penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Penggunaan Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota/Provinsi	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?	Berjalan dengan baik	

m) *Terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Tahapan	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Permasalahan Hukum dalam Rekapitulasi Suara	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?	Tidak ada Pelanggaran	

7) Penetapan Hasil

a) *Tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Tahapan	Penetapan Hasil	Ketepatan Waktu dalam Penetapan Hasil	Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?	Ya penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	

b) *Kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Tahapan	Penetapan Hasil	Ketepatan Waktu dalam Penetapan Hasil	apa kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil	Tidak ada kendala	

				pemilu?		
--	--	--	--	---------	--	--

c) *Jumlah kasus sengketa (PHPU) di wilayah anda*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Tahapan	Penetapan Hasil	Ketepatan Waktu dalam Penetapan Hasil	Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) di wilayah anda?	1 Kasus	

d) *Terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Tahapan	Penetapan Hasil	Permasalahan Hukum	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota?	Tidak ada	

e) *Terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Tahapan	Penetapan Hasil	PSU	Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?	Ada, 2 PSU Reguler dan 1 PSU Pasca MK	

f) *Terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Tahapan	Penetapan Hasil	Rekapitulasi ulang	Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?	Tidak ada	

VI.A.2 NON - TAHAPAN

1) Sosialisasi

a) *Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Non - Tahapan	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih ?	Sosialisasi ke pemilih pemula, Parpol, Daerah Terpencil	

b) *Jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Provinsi/Kab/Kota)*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Non - Tahapan	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Provinsi/Kab/Kota)	200-400 Orang	

c) *Bentuk kegiatan KPU Provinsi/Kab/Kota untuk sosialisasi*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Non - Tahapan	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Apa saja bentuk kegiatan KPU Provinsi/Kab/Kota untuk sosialisasi:	Sosialisasi ke pemilih pemula, Parpol, Daerah	

					Terpencil	
--	--	--	--	--	-----------	--

d) *Partai Politik Peserta Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Non - Tahapan	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Partai Politik Peserta Pemilu	Ya	

e) *Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Non - Tahapan	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?	Ya	

f) *Calon anggota DPR/DPRD*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Non - Tahapan	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Calon anggota DPR/DPRD	Ya	

g) *Jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Non - Tahapan	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Apakah jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai?	Ya Cukup memadai	

h) *KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang Peraturan	Ya	

				Kampanye?		
--	--	--	--	-----------	--	--

i) *Jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?	100-200 Orang	

j) *KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?	Ya	

k) *Jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?	500-700 Orang	

l) *Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU*

Provinsi/Kab/Kota merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Provinsi/Kab/Kota merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP?	Ya	

m) Kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra?	Ya	

n) Dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan stackholder terkait

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
14	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan stackholder terkait?	Ya	

o) *Sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
15	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi?	Ya	

p) *Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
16	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju?	Ya	

q) *Persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
17	Non - Tahapan	Sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?	80-100%	

r) *Terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
18	Non - Tahapan	Sosialisasi	Anggaran Sosialisasi	Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang	Ya	

				sudah ditetapkan?		
--	--	--	--	-------------------	--	--

s) *Ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
19	Non - Tahapan	Sosialisasi	Sosialisasi kepada kelompok disabilitas	Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai?	Ya	

t) *Jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
20	Non - Tahapan	Sosialisasi	Media sosialisasi	Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	5-10	

u) *Jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
21	Non - Tahapan	Sosialisasi	Media sosialisasi	Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	5	

v) *Tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
22	Non - Tahapan	Sosialisasi	Partisipasi Pemilih	Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan?	Ya	

w) *Persen tingkat keabsahan surat suara pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
23	Non - Tahapan	Sosialisasi	Partisipasi Pemilih	Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu?	70-100%	

x) *KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
24	Non - Tahapan	Sosialisasi	Partisipasi Pemilih	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi?	Tidak	

y) *Liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
25	Non - Tahapan	Sosialisasi	Partisipasi stakeholder	Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih?	10-20 liputan	

z) Keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah/BUMD dalam melaksanakan sosialisasi

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
26	Non - Tahapan	Sosialisasi	Partisipasi stakeholder	Seberapa banyak keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah/BUMD dalam melaksanakan sosialisasi?	50%	

aa) Keterlibatan lembaga swasta/non pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
27	Non - Tahapan	Sosialisasi	Partisipasi stakeholder	Seberapa banyak keterlibatan lembaga swasta/non pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi?	Tidak Ada	

bb) Keterlibatan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
28	Non - Tahapan	Sosialisasi	Partisipasi stakeholder	Seberapa banyak keterlibatan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi?	9-15 Lembaga Pendidikan	

2) Logistik Pemilu

a) *Regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik?	Ya	

b) *Jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Ketercukupan logistik Pemilu	Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota?	Ya	

c) *Alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Anggaran Logistik	Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu?	Ya	

d) *Perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Anggaran Logistik	Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan	Ya	

				logistik pemilu?		
--	--	--	--	------------------	--	--

e) *Pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	SDM Pengadaan	Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu?	Ya Mencukupi	

f) *Pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	SDM Pengadaan	Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa?	Tidak	

g) *Pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Pengadaan logistik	Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu	Ya	

				sesuai jadwal?		
--	--	--	--	----------------	--	--

h) *Penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Pengadaan logistik	Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu?	Ya	

i) *Dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Pengadaan logistik	Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP?	Ya	

j) *Dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Pengadaan logistik	Apakah terdapat dokumen kerjasama	Ya	

				dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawasan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?		
--	--	--	--	---	--	--

k) *Stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Keterlibatan stakeholder	Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu?	Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, KSOP, Pol PP	

l) *Terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Keterlibatan stakeholder	Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu?	Distribusi Logistik disesuaikan dengan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan	

m) Tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu?	Tidak Ada	

n) Dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
14	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Ketersediaan dokumen	Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota?	Ya	

o) Terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
15	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Permasalahan hukum	Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu?	Tidak Ada	

p) Persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
16	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Permasalahan hukum	Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai	50-70%	

				HPS)?		
--	--	--	--	-------	--	--

q) KPU Prov/Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
17	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik?	Ya	

r) Dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
18	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?	Ada	

s) KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
19	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Apakah KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?	Ya	

t) Mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
20	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota ?	Ya	

u) KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
21	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?	Ya	

v) Peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
22	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?	Ya Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan meminjamkan pelabuhan untuk bongkar muat logistik	

w) *Dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
23	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik?	Ya	

x) *KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
24	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?	Ya	

y) *Kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
25	Non - Tahapan	Logistik Pemilu	Monitoring	Apa saja kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu?	Tidak Ada Kendala	

3) Hukum

a) *Petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Non - Tahapan	Hukum	Peraturan Teknis	Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami?	Ya mudah dipahami	

b) *Petunjuk teknis tersebut mudah mengimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Non - Tahapan	Hukum	Peraturan Teknis	Apakah petunjuk teknis tersebut mudah mengimplemen tasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum?	Ya mudah diimplementasikan	

c) *Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Non - Tahapan	Hukum	Permasalahan Hukum	Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota ?	Nihil	

VI.A.3 KELEMBAGAAN

1) Pembekalan KPU Kab/Kota

a) *Seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Pembekalan KPU Prov/Kab/Kota	Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota	Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas ?	Ya Seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti Ortug	

b) *Modul Ortug mudah dipahami*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Pembekalan KPU Prov/Kab/Kota	Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota	Apakah Modul Ortug mudah dipahami?	Ya mudah dipahami	

c) *Kekurangan/kelemahan yang anda rasakan dalam pelaksanaan Orientasi Tugas*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Pembekalan KPU Prov/Kab/Kota	Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota	Apa kekurangan/kelemahan yang anda rasakan dalam pelaksanaan Orientasi Tugas?	Waktunya terlalu singkat	

2) Pembentukan Badan Adhoc

a) Instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Peraturan Teknis	Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan?	Ya mudah dilaksanakan	

b) Kendala dalam pembentukan Badan Adhoc

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Peraturan Teknis	Apa kendala dalam pembentukan Badan Adhoc?	Tidak ada kendala	

c) Materi bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan adhoc

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Pembekalan Badan Adhoc	Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan adhoc?	Ya	

d) Kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Pembekalan Badan Adhoc	Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?	Tidak ada kendala	

e) *Modul Bimtek KPPS mudah dipahami*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Pembekalan Badan Adhoc	Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami?	Ya mudah dipahami	

f) *Modul Bimtek PPS mudah dipahami*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Pembekalan Badan Adhoc	Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?	Ya mudah dipahami	

g) *Satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Helpdesk	Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc?	Ya	

h) *Helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Helpdesk	Apakah helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik?	Ya bekerja dengan baik	

i) *Satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Monev Pembentukan Badan Adhoc	Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?	Ya	

j) *Jumlah Kebutuhan Badan Adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Berapa Jumlah Kebutuhan Badan Adhoc ?	303 PPS 45 PPK	SK PPK dan PPS

k) *Jumlah Kebutuhan PPK*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Kebutuhan PPK	45 PPK	SK PPK

l) *Jumlah Kebutuhan PPS*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Kebutuhan PPS	303 PPS	SK PPS

m) *Jumlah Kebutuhan Pantarlih*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Kebutuhan Pantarlih	677	SK Pantarlih

n) *Jumlah Kebutuhan KPPS*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
14	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Kebutuhan KPPS	4.739	

o) *Jumlah Pendaftar Badan Adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
15	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Berapa Jumlah Pendaftar Badan Adhoc ?	5.000-7.000	

p) *Jumlah Pendaftar untuk PPK*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
16	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Pendaftar untuk	112	

				PPK		
--	--	--	--	-----	--	--

q) *Jumlah Pendaftar untuk PPS*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
17	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Pendaftar untuk PPS	400-500	

r) *Jumlah Pendaftar untuk Pantarlih*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
18	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Pendaftar untuk Pantarlih	700-800	

s) *Jumlah Pendaftar untuk KPPS*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
19	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterpenuhan Badan Adhoc	Jumlah Pendaftar untuk KPPS	5.000-6.000	

t) *Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
20	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Keterlambatan Penetapan Badan Adhoc	Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Adhoc?	Tidak ada	

- u) *Badan Adhoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan dengan pemberian diskresi berupa ketentuan pendidikan, kesehatan, dan domisili maupun pendaftaran non-mandiri untuk melihat faktual kemampuan dalam pemenuhan administrasi yang telah ditetapkan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
21	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan dengan pemberian diskresi berupa ketentuan pendidikan, kesehatan, dan domisili maupun pendaftaran non-mandiri untuk melihat faktual kemampuan dalam pemenuhan administrasi yang telah ditetapkan)	Tidak ada	

- v) *Badan Adhoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
22	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar)	Ada	

- w) *Nilai rerata tes tertulis dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari seluruh jumlah nilai dibagi jumlah peserta - Monitoring jumlah daerah yang mengalami kekurangan dan jumlah anggota badan adhoc hasil dari penunjukan/kerja sama serta melihat rerata kompetensi obyektif badan adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
23	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Berapa jumlah nilai rerata tes tertulis dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari seluruh jumlah nilai dibagi jumlah peserta - Monitoring jumlah daerah yang mengalami kekurangan dan jumlah anggota badan adhoc hasil dari penunjukan/kerja sama serta melihat rerata kompetensi obyektif badan adhoc	75	

x) *Nilai Tes Tertulis PPK pada pelaksanaan seleksi tertulis*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
24	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Rerata Nilai Tes Tertulis PPK pada pelaksanaan seleksi tertulis?	80	

y) *Nilai Tes Tertulis PPS pada pelaksanaan seleksi tertulis*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
25	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Rerata Nilai Tes Tertulis PPS pada pelaksanaan seleksi tertulis?	75	

z) *Jumlah Kecamatan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
26	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase penggunaan CAT	Berapa jumlah Kecamatan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)	9 Kecamatan	

aa) *Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
27	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase penggunaan CAT	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK?	Terpusat di 1 Tempat	

bb) Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
28	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase penggunaan CAT	Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)	Terpusat di 4 Zona Tes	

cc) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
29	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase penggunaan CAT	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS?	Terpusat di 4 Zona Tes	

dd) Persen jumlah Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya)

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
30	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase calon yang sebelumnya pernah menjadi badan adhoc	Berapa persen jumlah Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya)	40%	

ee) Jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
31	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase calon yang sebelumnya pernah menjadi badan adhoc	Jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?	50%	

ff) Persen Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan)

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
32	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan)	90-100%	

gg) Jumlah PPK, PPS, KPPS yang menyampaikan laporan tepat waktu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
33	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah PPK, PPS, KPPS yang menyampaikan laporan tepat waktu?	90-100%	

hh) Persen Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja)

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
34	Kelembagaan	Pembentukan	persentase	Berapa persen	81-100%	

	an	Badan Adhoc	jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja)		
--	----	-------------	--	---	--	--

ii) Jumlah PPS, KPPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
35	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah PPS, KPPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?	80-100%	

jj) Persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki internal yang harmonis tanpa ada konflik yang diketahui dengan hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan bukan perorangan)

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
36	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki internal yang	90-100%	

				harmonis tanpa ada konflik yang diketahui dengan hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan bukan perorangan)		
--	--	--	--	--	--	--

kk) Berapa persen jumlah PPK, PPS, KPPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
36	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Berapa persen jumlah PPK, PPS, KPPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?	Nihil	

ll) Berapa persen jumlah PPK, PPS, KPPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
37	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Berapa persen jumlah PPK, PPS, KPPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?	Nihil	

mm) Penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
38	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc	Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc	Ya	

				sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?		
--	--	--	--	---	--	--

nn) *Anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
39	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc	Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?	Ya	

oo) *Persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
40	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?	81-100%	

pp) *Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
41	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?	Ya	

qq) *Format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
42	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc?	Ya mudah dipahami	

rr) *Kendala yang dihadapi dalam pembuatan pertanggungjawaban oleh badan adhoc*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
43	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Apa Kendala yang dihadapi dalam pembuatan pertanggungjawaban oleh badan adhoc?	Tidak ada kendala	

ss) *Persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
44	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?	100%	

tt) *Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
45	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan	Ya	

				petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?		
--	--	--	--	---	--	--

uu) *Badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
46	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB)	Apakah badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?	Ya	

vv) *Aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
47	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB)	Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?	Ya sangat mempermudah	

ww) *Sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
48	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB)	Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?	Ya	

xx) Akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
49	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pemilu	Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota ?	Ya	

yy) Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
50	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc?	Ya	

zz) Persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
51	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?	80-100%	

aaa) *Persen jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
52	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota ?	81-100%	

bbb) *Petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
53	Kelembagaan	Pembentukan Badan Adhoc	SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan?	Ya	

3) Sistem Informasi

a) *Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Sistem Informasi	Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu	Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Sidalih, Silog, Sirekap, Siakba, Siakba, Sidapil, Silon, Sikadeka, Sikum, Siparmas	

b) *Kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi KPU oleh KPU Prov/Kab/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Sistem Informasi	Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu	Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi KPU oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Tidak ada kendala	

c) *Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Sistem Informasi	Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu	Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Sidalih, Silog, Sirekap, Siakba, Siakba, Sidapil, Silon, Sikadeka, Sikum, Siparmas	

4) Pengadaan Barang dan Jasa

a) *Kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya	Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia?	Ya	

b) *Persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya	Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?	0-20%	

c) *Metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya	Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?	Ya	

d) *Pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Kelembagaan	Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan PBJ	Apakah pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP?	Ya	

e) *Logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Kelembagaan	Pengadaan Barang dan Jasa	Kesamaan spesifikasi dan kecukupan logistik Pemilu	Apakah logistik yang dikontrakkan telah sesuai dengan kebutuhan?	Ya	

f) *Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Kelembagaan	Pengadaan Barang dan Jasa	Kesamaan spesifikasi dan kecukupan logistik Pemilu	Apakah Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak?	Ya	

5) Laporan Keuangan

a) *Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KPU Provinsi/kab/ Kota	Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan:	Ya	
				Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Ya	
				Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Ya	
				Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Ya	
				istem Pengendalian Intren yang memadai	Ya	
				Apakah KPU Provinsi dan KPU	Ya	

				Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?		
				Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)?	Ya	
				Apa kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan?	Keterlambatan Laporan Kegiatan	

6) BMN

a) *Pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	BMN	penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu	Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?	Ya	

b) KPU Provinsi/Kab/Kota telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	BMN	Penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu?	Ya	

c) Pemindahtanganan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	BMN	Penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu	Apakah pemindahtanganan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal?	Ya	

d) Pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Kelembagaan	BMN	Pengawasan	Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?	Ya	

- e) *Upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Kelembagaan	BMN	Pengawasan	Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?	Ya	

- f) *Jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup tersedia*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Kelembagaan	BMN	SDM	Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup tersedia?	Belum Mencukupi	

- g) *SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Kelembagaan	BMN	SDM	Apakah SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu?	Belum	

h) Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kab/Kota

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Kelembagaan	BMN	Sarana	Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kab/Kota?	Belum	

i) Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Kelembagaan	BMN	Sarana	Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?	Ya	

j) Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Kelembagaan	BMN	Sarana	Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?	Ya	

k) Strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Kelembagaan	BMN	Sarana	Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal?	Belum optimal	

l) Strategi yang sudah dilakukan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Kelembagaan	BMN	Sarana	Apa Strategi yang sudah dilakukan?		
				a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN (persediaan pemilu)	V	
				e. Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtanganan barang Persediaan pasca Pemilu)	V	
				f. Tindak Lanjut BMN rusak berat (tidak digunakan/usang)	V	
				h. penggunaan BMN sesuai ketentuan	V	

m) Sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup membantu KPU Provinsi/Kab/Kota

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Kelembagaan	BMN	Sarana	Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup	Ya	

				membantu KPU Provinsi/Kab/Kota?		
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

6) PERENCANAAN

a) Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?	Ya	

b) Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	Ya	

c) Berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	7 kali	

d) *Persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	80-100%	

e) *Petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ?	Ya	

f) *Satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran?	Ya	

g) *Penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan	Ya	

				petunjuk teknis yang berlaku?		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

h) Rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?	Ya	

i) Hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2022	Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?	Tidak ada hambatan	

j) Unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023?	Ya	

k) Satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
11	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk	Ya	

				kebutuhan Tahapan Pemilu?		
--	--	--	--	---------------------------	--	--

l) *Berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
12	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	13 kali	

m) *Persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
13	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	90-100%	

n) *Petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
14	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ?	Ya	

o) *Penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
15	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?	Ya	

p) *Rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
16	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?	Ya	

q) *Hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
17	Kelembagaan	Perencanaan	Anggaran 2023	Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?	Tidak ada Hambatan	

7) KERJASAMA

a) Tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Kerjasama	Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?	Ya	

b) Pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Kerjasama	Juknis	Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami?	Ya	

c) Terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Kerjasama	Juknis	Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut?	Tidak Ada	

d) Ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Kelembagaan	Kerjasama	Pelaksanaan kerja sama	Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana?	Ya	

e) Tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Kelembagaan	Kerjasama	Pelaksanaan kerja sama	Apakah tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?	Ya	

f) Kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Kelembagaan	Kerjasama	Pelaksanaan kerja sama	Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)	Ya	
				Sebutkan kegiatan tindaklanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder!	Kejaksaaan, POLRES	
				Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati?	Tidak ada kendala	
				Apa saja hasil dari pelaksanaan kerjasama	Saling melakukankoor dinasi antar Instansi	
				Apa dampak dari kegiatan kerjasama yang telah dilakukan?	Sangat Positif	
				Berapa banyak dokumen	50%	

				kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu?		
				Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang telah bekerjasama dengan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)	Kejaksaan, POLRES	
				Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antara KPU Prov/Kab/Kota dengan instansi pemerintah daerah?	Tidak ada kendala	
				Apakah (MoU dan PKS) telah dilakukan reuiu oleh APIP?	Belum	

8) STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

a) Dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit kerja

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit kerja?	Ya	

- b) *Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Ketersediaan dokumen	Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan?	Ya	

- c) *Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Ketersediaan dokumen	Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan?	10-20 SOP	

- d) *Kendala dalam penyusunan SOP*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Ketersediaan dokumen	Apa saja kendala dalam penyusunan SOP?	Tidak Ada Kendala	

- e) *SOP tersebut telah diimplementasikan*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Pelaksanaan	Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan?	Ya	

- f) *Kendala dalam pengimplementasian SOP*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Pelaksanaan	Apa saja kendala dalam	Tidak Ada Kendala	

		Procedure		pengimplementasian SOP?		
--	--	-----------	--	-------------------------	--	--

g) *Dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Pelaksanaan	Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun?	Ya	

h) *Dampak SOP yang telah disusun terhadap Peningkatan kinerja*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Kelembagaan	Standard Operatioanl Procedure	Pelaksanaan	Apa dampak SOP yang telah disusun terhadap Peningkatan kinerja?	Tertib	

9) MONEV KELEMBAGAAN

a) *Satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu*

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Penggunaan aplikasi monev	Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu?	Ya	

b) Kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Penggunaan aplikasi monev	Apa kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas?	Tidak Ada	

c) Kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
3	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Penggunaan aplikasi monev	Apa kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala?	Tidak Ada	

d) Satker memiliki SDM yang bersertifikasi

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
4	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Penggunaan aplikasi monev	Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi?	Tidak Ada	

e) KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Pelaksanaan monev	Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output?	Ya	

f) Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
6	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Pelaksanaan monev	Apakah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi	Ya	

				capaian output pada unit kerja?		
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

g) Unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
7	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Pelaksanaan monev	berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?	81-100%	

h) Cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
8	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Pelaksanaan monev	Bagaimana cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?	81-100%	

i) Nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
9	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Nilai Kinerja	Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022?	81-100%	

j) Nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
10	Kelembagaan	Monev Kelembagaan	Nilai Kinerja	Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023?	81-100%	

10) PELAPORAN KELEMBAGAAN

a) LKjIP

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Pelaporan Kelembagaan	Penyusunan Laporan	Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?	Ya	
				Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 ?	Ya	
				Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan?	Ya	
				Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance?	Ya	
				Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan?	Ya	
				Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu?	Ya	
				Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan?	Ya	
				Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU	Ya	

				Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan SMART DJA)?		
				Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?	Ya	
				Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?	Ya	

b) Review Laporan Keuangan KPU Prov/Kab/Kota

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Pelaporan Kelembagaan	Review Laporan Keuangan KPU Prov/Kab/Kota	Apakah Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?	Ya	
				Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Utama KPU?	Ya	
				Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk Satker KPU Kabupaten/Kota?	Ya	

11) REFORMASI BIROKRASI

a) Pelaksanaan Reformasi Birkokrasi

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Reformasi Birkokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birkokrasi	Apakah dampak pelaksanaan RB terhadap organisasi?	Dampak RB terhadap organisasi adalah organisasi lebih meningkatkan kinerja dan mematuhi peraturan yang ada sehingga akan menjadi good governance	
				Adakah kendala dalam pelaksanaan RB ?	Tidak Ada	
				Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi?	Ya	
				Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU?	Ya	

12) SOTK

a) Penerapan SOTK

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	SOTK	Penerapan SOTK	Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?	Tidak	
				Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ?	Tidak	

				Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja?	Tidak	
				Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi?	61-80%	
				Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja?	Tidak	
				Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas?	Pekerjaan yang tumpang tindih karena kekurangan pegawai	
				Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018?	Belum	

13) PELAYANAN PUBLIK

a) Evaluasi kinerja Pelayanan publik

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
1	Kelembagaan	Pelayanan publik	Evaluasi kinerja Pelayanan publik	Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?	Ya	
				Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan	Ya	

				Publik di KPU?		
				Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?	Ya	
				Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5)	81-100%	

b) SKM

No.	Dimensi	Sub - Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	Kelembagaan	Pelayanan publik	SKM	Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik?	Ya	
				Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?	Ya	
				Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?	Ya	
				Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	81-100%	

				(IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan terbuka)		
--	--	--	--	---	--	--

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Menindaklanjuti penyelenggaraan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang selesai dilaksanakan, KPU menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilu Tahun 2024. Evaluasi ini mencakup penyelenggaraan tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu (yang mencakup dukungan fasilitasi penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan pemilu), serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu dalam ruang lingkup obyek evaluasi mencakup penyelenggaraan pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badan Adhoc.

B. SARAN

1. Evaluasi diharapkan dapat berguna untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak (eksplanasi) sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati, mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya, mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan, mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency, mengetahui dampak dari kebijakan, sebagai kontrol terhadap kebijakan (mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya), serta menghasilkan rekomendasi.

2. Dalam hal pemetaan pelaksanaan tahapan distribusi logistik d KPU Kabupaten Kepulauan Meranti harus berkoordinasi dengan banyak stakeholder karena kondisi geografis yang berbentuk kepulauan. Koordinasi ini harus dilakukan secara matang dan terukur mengingat potensi kendala lapangan yang lumayan variatif.

BAB VI

PENUTUP

Demikian laporan Hasil pengisian kuesioner evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban. Evaluasi pemilu itu sendiri merupakan kegiatan untuk mereview dan menilai pelaksanaan tahapan pemilu guna mengetahui permasalahan, kendala, hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengidentifikasi keberhasilan dan faktor-faktor pendukungnya, sehingga akan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.